

Analisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum serta dana alokasi khusus terhadap belanja daerah serta produk domestik regional bruto di kota samarinda

Agnes Ajeng Aryanti¹, Theresia Militina², Ardi Paminto³

**Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman,
Samarinda**

Email: nezz_cistlicious@yahoo.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah: Mengalisis dan menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus secara langsung positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Kota Samarinda. Mengalisis dan menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus secara langsung positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto di Kota Samarinda. Mengalisis dan menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus secara tidak langsung positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto melalui belanja daerah di Kota Samarinda Dalam rangka menguji analisis hipotesis penulis menggunakan alat analisis Jalur dengan menggunakan SPSS 23. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja daerah, produk domestik regional bruto. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh langsung antara pendapatan asli daerah dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap belanja daerah dan PDRB. Terdapat pengaruh tidak langsung antara pendapatan asli daerah dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap PDRB melalui belanja daerah.

Kata Kunci: pendapatan asli daerah; dana alokasi umum; dana alokasi khusus; jumlah dak; belanja daerah dan pdrb

Analysis of the influence of local revenues and general allocation funds and special allocation funds on regional expenditures and gross regional domestic products in the city of samarinda

Abstract

The objectives of this research are: To analyze and to examine the effect of local revenue, general allocation fund, special allocation fund directly positive and significant to local expenditure in Samarinda city. Analyzing and testing the effect of local revenue, general allocation funds, special allocation funds directly positive and significant to gross regional domestic product in Samarinda City. Analyzing and testing the effects of local revenue, general allocation funds, special allocation funds indirectly positive and significant to gross regional domestic product through regional spending in Samarinda City In order to test the hypothesis analysis the author uses the path analysis tool using SPSS 23. The data used in this study is the original revenue area general allocation funds, special allocation funds, regional expenditure, gross regional domestic product. The results of the analysis indicate that there is a direct influence between the local revenue of general allocation funds, special allocation funds to regional expenditure and GRDP. There is an indirect influence between the local revenue of the general allocation fund, the special allocation fund to GRDP through regional spending.

Keywords: local revenue; general allocation funds; special allocation funds; population amount; regional expenditure and grdp

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberlakuan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mulai 1 Januari 2001, yang kemudian diperbarui dengan UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahan dan keuangan daerah. Otonomi daerah mempunyai tujuan dalam rangka mencapai kemandirian daerah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Hal tersebut dimaksudkan bahwa daerah lebih mengerti kondisi daerahnya sehingga pembangunan daerah akan dapat difokuskan pada prioritas kebutuhan dan potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

Meningkatkan produk domestik regional bruto, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan belanja pemerintah daerah. Sodik (2007) mengemukakan bahwa belanja pemerintah daerah (baik belanja rutin maupun pembangunan) berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto. Belanja pemerintah daerah merupakan bentuk rangsangan atau stimulus yang dilakukan untuk memacu perkembangan perekonomian daerah.

Produk domestik regional bruto di Kota Samarinda sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional yaitu mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, bahkan di Kota Samarinda sendiri mengalami percepatan produk domestik regional bruto cukup tinggi. Produk domestik regional bruto didorong oleh membaiknya aktivitas Pertambangan dan pergerakan positif sektor Perdagangan serta sektor-sektor lainnya.

Pertumbuhan yang positif menunjukkan kenaikan produksi barang dan jasa di daerah tersebut. Nilai Nominal PDRB merupakan besaran nilai tambah dari masing-masing sektor Ekonomi (PDRB atas dasar harga berlaku) dan digunakan untuk mengetahui potensi ekonomi suatu daerah dalam mengelola sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber daya Manusia (SDM). Sedangkan laju produk domestik regional bruto salah satu indikator tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode tertentu dan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu daerah dalam periode tertentu.

Kontribusi belanja pemerintah daerah terhadap PDRB berkisar antara 20-25 persen, berbeda dengan nasional yang hanya sembilan persen terhadap PDB. Campur tangan pemerintah daerah yang masih besar sesuai dengan tahap perkembangan pengeluaran pemerintah yang masih berada di tahap awal perkembangan. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah tidak saja mencerminkan arah dan pencapaian kebijakan fiskal dalam mendorong pembangunan di daerah secara umum, tetapi juga menggambarkan sejauh mana tugas dan kewajiban yang diembankan pada pemerintah daerah dalam konteks desentralisasi fiskal itu dilaksanakan. Hasil produk domestik regional bruto diarahkan agar dapat dinikmati masyarakat sampai di lapisan paling bawah, baik dengan sendirinya maupun dengan campur tangan pemerintah.

Struktur ekonomi daerah diukur dari peran masing-masing sektor atau lapangan usaha terhadap total PDRB. Semakin besar nilai tambah yang tercipta di suatu sektor ekonomi akan membuat peran sektor tersebut semakin penting. Struktur ekonomi suatu daerah menjadi faktor penentu apakah daerah tersebut didominasi oleh sektor primer, sekunder atau tersier. Sektor primer adalah sektor yang masih banyak mengandalkan peran sumber daya alam dalam proses produksi yaitu sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian.

Sektor sekunder adalah sektor yang tidak terlalu mengandalkan peran sumber daya alam, akan tetapi lebih banyak mengandalkan kemajuan teknologi dan peran sumber daya manusia yaitu sektor industri pengolahan, listrik dan air serta konstruksi. Sedangkan sektor tersier adalah sektor yang bisa dikatakan tidak mengandalkan sumber daya alam lagi yaitu sektor perdagangan, pengangkutan dan telekomunikasi, bank dan lembaga keuangan lain dan sektor jasa-jasa.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya desentralisasi fiskal, daerah mempunyai

kewenangan yang lebih besar untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya sehingga seharusnya porsi pendapatan asli daerah sebagai komponen penerimaan daerah juga meningkat. Peningkatan pendapatan asli daerah yang dianggap sebagai modal, secara akumulasi akan lebih banyak menimbulkan eksternalitas yang bersifat positif dan akan mempercepat produk domestik regional bruto (Pujiati, 2008).

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah tersebut banyak digunakan untuk membiayai belanja lainnya.

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 32/2004). Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan pendapatan asli daerah yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya.

Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN (anggaran pendapatan dan belanja Negara) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah pusat memberikan bantuan berupa DAU yang besarnya sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Untuk daerah provinsi menerima sebesar 10% dari DAU yang ditetapkan, sedangkan kabupaten/kota sebesar 90%. Pengaturan lebih lanjut dituangkan dalam peraturan pemerintah Nomor 104 tahun 2000 yang menyatakan bahwa pembagian DAU kepada seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan bobot masing-masing daerah yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan wilayah otonomi daerah dan potensi ekonomi daerah.

Komponen desentralisasi fiskal yaitu Dana Alokasi Khusus. Dana alokasi khusus (DAK) adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 162 Ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang mengamanatkan agar DAK ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Pelaksanaan DAK sendiri diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas seperti pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan tender pengadaan kegiatan fisik.

Produk domestik regional bruto tidak lepas dari penduduk sebagai bagian penting penggerak perekonomian. Penduduk berfungsi ganda dalam perekonomian, dalam konteks pasar ia berada pada sisi permintaan maupun penawaran. Di sisi permintaan penduduk adalah konsumen, sumber permintaan barang dan jasa. Dan disisi penawaran penduduk adalah produsen jika ia sebagai pengusaha, pedagang, atau tenaga kerja.

Dalam konteks pembangunan pandangan penduduk terpecah dua ada yang menganggapnya sebagai penghambat pembangunan dan ada pula yang menganggap sebagai pemacu pembangunan.

Simon dalam Todaro (2006) mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk bukanlah suatu masalah. Melainkan sebaliknya justru merupakan unsur penting yang berdampak positif dan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi, baik Negara maju ataupun Negara berkembang. Adam Smith juga berpendapat dengan didukung bukti empiris bahwa pertumbuhan penduduk tinggi akan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Penambahan penduduk yang tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Artinya semakin besar jumlah penduduk yang diiringi dengan investasi lebih dalam pemberdayaan sumberdaya manusia (SDM) akan mengakibatkan banyak bermunculan ide-ide gagasan baru dan tenaga ahli, dengan demikian akan semakin berkembang teknologi. Selanjutnya dalam jangka panjang penduduk merupakan suatu keuntungan dalam pembangunan ekonomi.

Tabel 1.1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai variabel eksogen. Variabel belanja daerah dan PDRB sebagai variabel endogen dari tahun

2002-2016.

Tahun	PAD	DAU	DAK	Belanja Daerah	PDRB
	X ₁	X ₂	X ₃	Y ₁	Y ₂
	Dalam Juta Rp	Dalam Juta Rp	Dalam Juta Rp	Dalam Juta Rp	Dalam Juta Rp
2002	1000674.91	102769	131059	703187.13	29943040.21
2003	1098537.84	110949	136629	759681.21	35223210.68
2004	1149750.73	134975	146541	852981.44	36415984.78
2005	1167979.82	138563	157453	899364.31	38690404.25
2006	1185683.81	143875	160399	1054981.01	42943040.65
2007	1190474.27	135653	164501	900087.72	42356838.82
2008	1502616.11	130515	168741	1084332.19	45476199.01
2009	1819128.73	129874	171880	1290641.23	46261396.76
2010	2034662.45	128285	179079	3206240.97	47752070.65
2011	2111299.56	213836	191807	5259572.55	48278439.73
2012	2208309.12	295970	209616	6309258.87	41091410.08
2013	2711299.56	300856	229897	5918568.27	44679204.90
2014	4503238.83	254357	234920	8142835.45	48092230.62
2015	5409949.39	160319	252347	11339765.18	51112414.71
2016	5885262.99	340384	362084	13780244.87	54967314.58

Sumber: Bappeda Kota Samarinda.

Berdasarkan penjabaran tersebut maka penelitian ini akan mampu memberikan gambaran mengenai kebijakan yang harus diambil pemerintah daerah dalam menetapkan belanja daerah dan besaran PDRB di Kota Samarinda melalui pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum Kota Samarinda sebagai acuannya.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hubungan Antar Variabel

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah

Studi tentang pengaruh pendapatan daerah (*local own resources*)

revenue) terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan (misalnya Aziz et al, 2000; Blackly, 1986; Joulfaian & Mokeerjee, 1990; Legrenzi & Milas, 2001; Von Furstenberg et al, 1986). Hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan daerah (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah dikenal dengan nama *tax spend hypothesis* (Aziz et al, 2000; Doi, 1998; Von Furstenberg et al 1986).

Pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran. Dalam konteks internasional, beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk melihat pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja (diantaranya adalah Cheng, 1999; Friedman, 1978; Hoover & Sheffrin, 1992). Cheng (1999) menemukan bahwa hipotesis pajak-belanja berlaku untuk kasus Pemda di beberapa negara Amerika Latin, yakni Kolombia, Republik Dominika, Honduras, dan Paraguay. Friedman (1978) menyatakan bahwa kenaikan dalam pajak akan meningkatkan belanja daerah, sehingga akhirnya akan memperbesar defisit.

Menurut Hoover & Sheffrin (1992), yang secara empiris menemukan adanya perbedaan hubungan dalam dua rentang waktu yang berbeda. Mereka menemukan bahwa untuk sampel data sebelum pertengahan tahun 1960-an pajak berpengaruh terhadap belanja, sementara untuk sampel data sesudah tahun 1960-an pajak dan belanja tidak saling mempengaruhi (*causally independent*).

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah

Dalam literatur ekonomi dan keuangan daerah, hubungan pendapatan dan belanja daerah didiskusikan secara luas sejak akhir dekade 1950-an dan berbagai hipotesis tentang hubungan tersebut diuji secara empiris (Chang & Ho, 2002). Sebagian studi menyatakan bahwa pendapatan mempengaruhi belanja, sementara sebagian lainnya menyatakan bahwa belanjalah yang mempengaruhi pendapatan (Aziz, 2000; dan Doi, 1998).

Studi tentang pengaruh transfer atau *grants* dari Pempus terhadap keputusan pengeluaran atau belanja Pemda sudah berjalan lebih dari 30 tahun (Gamkhar & Oates, 1996). Secara teoritis, respon tersebut akan mempunyai efek distributif dan alokatif yang tidak berbeda dengan sumber pendanaan lain, misalnya pendapatan pajak daerah (Bradford & Oates, 1971). Namun, dalam studi empiris hal tersebut tidak selalu terjadi. Artinya, stimulus terhadap pengeluaran daerah yang ditimbulkan oleh transfer atau *grants* tersebut sering lebih besar dibandingkan dengan stimulus dari pendapatan (pajak) daerah sendiri (*flypaper effect*).

Holzt-eakin et al (1985) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari Pempus dengan belanja Pemerintah daerah. Studi Legrenzi & Milas (2001), menggunakan sampel *municipalities* di Italia,

menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel- variabel kebijakan Pemda dalam jangka pendek disesuaikan (*adjusted*) dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang *non- linier* dan *asymmetric*.

Gamkhar & Oates (1996) menganalisa respon Pemda terhadap perubahan jumlah transfer dari pemerintah federal di Amerika Serikat untuk tahun 1953-1991. Mereka menyatakan bahwa pengurangan jumlah transfer (*cuts in federal grants*) menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah.

Studi Holzt-Eakin et al (1994) menganalisis model *maximizing under uncertainty of intertemporal utility function* dengan menggunakan data runtun waktu selama tahun 1934-1991 untuk mengetahui seberapa jauh pengeluaran daerah dapat dirasionalkan melalui suatu model, dimana keputusan-keputusan didasarkan pada ketersediaan sumberdaya secara permanen, bukan ketersediaan yang sifatnya temporer. Mereka menemukan bahwa semua *current spending* ditentukan oleh *current resources*.

Studi Holzt-Eakin et al (1985) menemukan bahwa *grants* tahun lalu dapat memprediksi belanja tahun ini, namun sebaliknya, belanja tahun lalu tidak dapat memprediksi pendapatan tahun berjalan.

3. Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah

DAK merupakan sumber pendapatan yang dialokasikan dari APBN kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus lain dari alokasi umum, misalnya pembangunan jalan di kawasan terpencil, sarana-prasarana untuk daerah. Semakin banyak DAK yang diterima, berarti daerah tersebut masih tergantung terhadap pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa DAK mempunyai pengaruh terhadap Belanja Daerah.

Pada hakikatnya DAK adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus sebagai urusan daerah dan sesuai prioritas nasional. Menurut UU No. 33 tahun 2004, yang dimaksud kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional (Yuwono

2008:51). Belanja Daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang dapat mengakibatkan berkurangnya nilai ekuitas dana sebagai kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran serta tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah (Yuwono 2008:96). Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang- undangan. Riset Muis (2012) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta juga berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Daerah.

4. Pengaruh Belanja Daerah Terhadap produk domestik regional bruto

Iskana (2009) meneliti tentang Pengaruh Belanja dan Pendapatan Terhadap Produk domestik regional bruto, Kemiskinan Dan Pengangguran pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan Belanja Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto,

belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran.

Pendapatan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto, pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran. Untuk Produk domestik regional bruto tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, produk domestik regional bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran.

Indonesia telah melakukan kebijakan mengatasi permasalahan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah, akan tetapi fenomena yang terjadi justru menunjukkan bahwa jumlah masyarakat miskin tidak berkurang. Ini membuktikan bahwa hasil pembangunan yang dilakukan selama ini belum memberikan kemakmuran yang merata sehingga terjadi kesenjangan pendapatan. Jika setiap daerah mampu mengoptimalkan berbagai potensi di sektor masing-masing, maka dengan sendirinya peningkatan terhadap PAD akan lebih tinggi. Dengan begitu daerah tersebut akan meminimalkan tingkat pengangguran didaerahnya dan mengurangi jumlah kemiskinan yang ada di daerah.

Masalah ketimpangan ekonomi antar daerah menjadi suatu masalah yang dilema di Indonesia. Berbagai program yang dikembangkan untuk menjembatani ketimpangan antar daerah selama ini ternyata belum mencapai hasil yang memadai karena dimasa mendatang agaknya alokasi anggaran pembangunan sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Strategi alokasi anggaran ini bisa mendorong dan mempercepat produk domestik regional bruto sekaligus menjadi alat mengurangi kesenjangan/ketimpangan regional (Kuncoro, 2003:112).

C. Hipotesis

Dengan memperhatikan latar belakang masalah, kajian teoritis penelitian terdahulu serta kerangka konsep maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Kota Samarinda
2. Dana alokasi umum berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Kota Samarinda
3. Dana alokasi khusus berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Kota Samarinda
4. Belanja daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto di Kota Samarinda
5. Pendapatan asli daerah berpengaruh secara tidak langsung positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto melalui belanja daerah di Kota Samarinda
6. Dana alokasi umum berpengaruh secara tidak langsung positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto melalui belanja daerah di Kota Samarinda
7. Dana alokasi khusus berpengaruh secara tidak langsung positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto melalui belanja daerah di Kota Samarinda

METODE

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini dibentuk dengan data sekunder dan menggunakan data *time series* dan dianalisis dengan analisis jalur. Penelitian ini termasuk penelitian kausalitas yang menjelaskan hubungan timbal balik antara variabel *dependent* dan variabel *independent*.

Penelitian ini termasuk penelitian eksplanatif karena hasil penelitian diulas berdasarkan gambaran dari fenomena yang terjadi secara nyata baik yang berhubungan dengan produk domestik regional bruto, belanja daerah, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum. Penelitian ini juga berusaha menjelaskan hubungan sebab akibat antara fakta-fakta dari produk domestik regional bruto, belanja daerah, pendapatan asli daerah dana dana alokasi umum serta dana alokasi khusus.

B. Identifikasi Variabel Penelitian

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok variabel yaitu: variabel tidak bebas (*dependent variable*) yang dalam penelitian ini ditunjukkan oleh produk domestik regional bruto (Y_2) dan belanja daerah (Y_1) dan penggunaan variabel-variabel bebas (*independent variable*) (X) yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).

C. Definisi Operasional

Penelitian ini lebih terfokus pada permasalahan sekaligus menghindari penafsiran yang salah mengenai variabel-variabel yang digunakan, maka definisi operasional dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Produk domestik regional bruto (Y_2) adalah produk domestik regional bruto yang digunakan dalam penelitian ini adalah produk domestik regional bruto dasar harga konstan dalam satuan juta rupiah.
2. Belanja daerah (Y_1) adalah Alokasi Belanja Pemerintah Daerah menurut fungsi adalah realisasi anggaran belanja menurut kategori jenis belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, dalam satuan juta rupiah.
3. Pendapatan asli daerah (X_1) adalah Sumber PAD yang berasal dari total pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Kota Samarinda dalam satuan juta rupiah.
4. Dana alokasi umum (X_2) adalah sumber DAU berasal dari transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan dalam satuan juta rupiah.
5. Dana alokasi khusus (X_3) merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang dalam satuan juta rupiah

D. Jangkauan Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Samarinda tahun 2002-2016. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah serta dampaknya terhadap produk domestik regional bruto di Kota Samarinda, maka variabel yang digunakan antara lain produk domestik regional bruto, keuangan daerah, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus.

E. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder dimana keseluruhan data berupa produk domestik regional bruto, keuangan daerah, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus Kota Samarinda tahun 2002-2016 sementara untuk data penunjang lainnya diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Samarinda.

F. Alat Analisis

Menurut Retherford dalam Sunyoto (2012:1) analisis jalur adalah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung. Paul Webley dalam Sunyoto (2012:1) analisis jalur merupakan pengembangan langsung bentuk regresi berganda dengan tujuan untuk memberikan estimasi tingkat kepentingan (*magnitude*) dan signifikansi (*significance*) hubungan sebab akibat hipotesis dalam seperangkat variabel.

Menurut David Garson dalam Sunyoto (2012:1) regresi dikenakan pada masing-masing variabel dalam suatu model sebagai variabel tergantung (pemberi respon) sedang yang lain sebagai penyebab. Pembobotan regresi diprediksikan dalam suatu model yang dibandingkan dengan matriks korelasi untuk semua variabel dan dilakukan juga penghitungan uji keselarasan statistik. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya analisis jalur merupakan kepanjangan dari analisis regresi berganda.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Data Penelitian

Berikut ini disajikan data penelitian yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai variabel eksogen. Variabel belanja daerah dan PDRB sebagai variabel endogen dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2016. Peyajian data sebagai berikut:

Tabel 4.1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai variabel eksogen. Variabel belanja daerah dan PDRB sebagai variabel endogen dari tahun 2002-2016.

Tahun	PAD	DAU	DAK	Belanja Daerah	PDRB
	X_1	X_2	X_3	Y_1	Y_2
	Dalam Juta Rp	Dalam Juta Rp	Dalam Juta Rp	Dalam Juta Rp	Dalam Juta Rp
2002	1000674.91	102769	131059	703187.13	29943040.21
2003	1098537.84	110949	136629	759681.21	35223210.68
2004	1149750.73	134975	146541	852981.44	36415984.78
2005	1167979.82	138563	157453	899364.31	38690404.25
2006	1185683.81	143875	160399	1054981.01	42943040.65
2007	1190474.27	135653	164501	900087.72	42356838.82
2008	1502616.11	130515	168741	1084332.19	45476199.01
2009	1819128.73	129874	171880	1290641.23	46261396.76
2010	2034662.45	128285	179079	3206240.97	47752070.65
2011	2111299.56	213836	191807	5259572.55	48278439.73
2012	2208309.12	295970	209616	6309258.87	41091410.08
2013	2711299.56	300856	229897	5918568.27	44679204.90
2014	4503238.83	254357	234920	8142835.45	48092230.62
2015	5409949.39	160319	252347	11339765.18	51112414.71
2016	5885262.99	340384	362084	13780244.87	54967314.58

Sumber: BAPPEDA Kota Samarinda.

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis

1. Uji Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Bagian ini menguraikan tiap-tiap jalur dalam model dengan menggunakan analisis jalur, dengan penjabaran mengenai sub-struktur pertama dan sub-struktur yang kedua sebagai berikut:

Tabel 5.5 : Nilai koefisien jalur: X1, X2, X3 dan Y₁

Model (Constant)	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	-3458080,959	1373671,26		-2,517	,029
X1	2,056	,414	,784	4,970	,000
X2	12,235	5,656	,226	2,163	,053
X3	2,815	14,873	,039	,189	,853

Sumber : Lampiran 2, Output SPSS.

Pada fungsi 1 (sub-struktur-1), variabel eksogen = X1, X2, X3 dan variabel endogen Y₁ dapat diketahui persamaan sebagai berikut :

$$Y_1 = 0.784 X_1 + 0.226 X_2 + 0.039 X_3$$

Berdasarkan model path yang telah dihasilkan diatas, selanjutnya dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- a. Koefisien PAD (X₁) sebesar 0.784, artinya pengaruh PAD (X₁) secara langsung terhadap belanja daerah (Y₁) sebesar 0.784.
- b. Koefisien DAU (X₂) sebesar 0.226, artinya pengaruh DAU (X₂) secara langsung terhadap belanja daerah (Y₁) sebesar 0.226.
- c. Koefisien DAK (X₃) sebesar 0.039, artinya pengaruh DAK (X₃) secara langsung terhadap belanja daerah (Y₁) sebesar 0.039.

Tabel 5.6 : Nilai koefisien jalur: Y₁ dan Y₂

Model (Constant)	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	3889738411	166787766		23.321	.000
Y1	1.135	.287	.739	3.949	.002

Sumber : Lampiran 2, Output SPSS.

Pada fungsi 2 (sub-struktur-2), variabel eksogen = Y₁ dan variabel endogen Y₂ dapat diketahui persamaan sebagai berikut :

$$Y_2 = 0.739 Y_1$$

Berdasarkan model path yang telah dihasilkan diatas, selanjutnya dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- a. Koefisien belanja daerah (Y₁) sebesar 0.739, artinya pengaruh belanja daerah (Y₁) secara langsung terhadap PDRB (Y₂) sebesar - 0.739.

2. Analisis Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel *independent* terhadap *dependent* dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi (R) serta analisis koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menunjukkan proporsi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Nilai R dan R^2 yang diperoleh dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 5.7 : Analisis koefisien korelasi dan koefisien determinasi untuk variabel penelitian X1, X2, X3 dan Y1.

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,984 ^a	,969	,960	848637,97989

Sumber : Lampiran 2, Output SPSS.

Berdasarkan hasil data didapatkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,984. Hal ini berarti terdapat hubungan antara PAD, DAU, DAK dengan belanja daerah dengan tingkat hubungan sangat kuat karena berada diinterval koefisien 0.800-1.000. Sedangkan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,969 artinya bahwa 96.90% variasi dari variabel belanja daerah dapat dijelaskan

oleh PAD, DAU, DAK sedangkan 3.10% lainnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam variabel yang diteliti.

Tabel 5.8 : Analisis koefisien korelasi dan koefisien determinasi untuk variabel penelitian Y1 dan Y2.

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,739 ^a	,545	,510	457045003.7

Sumber : Lampiran 2, Output SPSS.

Berdasarkan hasil data didapatkan nilai koefisien korelasi sebesar 0.739. Hal ini berarti terdapat hubungan antara belanja daerah dengan PDRB dengan tingkat hubungan kuat karena berada diinterval koefisien 0.600-0.799. Sedangkan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,545 artinya bahwa 54.5% variasi dari variabel PDRB dapat dijelaskan oleh belanja daerah sedangkan

45.50% lainnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam variabel yang diteliti.

3. Uji F (Uji Secara Simultan)

Pengujian ini untuk mengetahui adanya pengaruh variabel eksogen =

X1, X2, X3 terhadap variabel endogen Y1 dan mengetahui adanya pengaruh variabel eksogen = X1, X2, X3 terhadap variabel endogen Y2 serta mengetahui pengaruh variabel eksogen = X1, X2, X3 Y1 terhadap variabel endogen Y2 hasil pengujian secara simultan sebagai berikut:

Tabel 5.9 : Hasil Analisis Uji F (Uji Simultan) variabel eksogen = X1, X2, X3 terhadap variabel endogen Y₁.

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2448568,900	3	8161894,640	113,330	,000 ^b
	Residual	7922050,212	11	7201864,383		
	Total	2527788,120	14			

Sumber : Lampiran 2, Output SPSS.

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan pada taraf signifikan (α) 10% pada tabel ANOVA terlihat nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan 10% (0.05) untuk seluruh variabel, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa secara bersama-sama eksogen = X1, X2, X3 berpengaruh secara signifikan terhadap variabel endogen Y₁.

Tabel 5.10 : Hasil Analisis Uji F (Uji Simultan) variabel eksogen = Y₁ terhadap variabel endogen Y₂.

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.258	1	3.258	15.597	.002
	Residual	2.716	13	2.089		
	Total	5.974	14			

Sumber : Lampiran 2, Output SPSS.

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan pada taraf signifikan (α) 10% pada tabel ANOVA terlihat nilai signifikansi 0,002 lebih kecil dibandingkan dengan 10% (0.05) untuk seluruh variabel, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa secara bersama-sama variabel eksogen = Y₁ berpengaruh secara signifikan terhadap variabel endogen Y₂.

4. Uji t (Uji Secara Parsial)

Pengujian ini untuk mengetahui adanya pengaruh variabel eksogen =

X1, X2, X3 terhadap variabel endogen Y₁ dan mengetahui adanya pengaruh variabel eksogen = X1, X2, X3 terhadap variabel endogen Y₂ serta mengetahui pengaruh variabel eksogen = X1, X2, X3, Y₁ terhadap variabel endogen Y₂ hasil pengujian secara parsial sebagai berikut:

Tabel 5.11 : Hasil Analisis Uji t (Uji Parsial) variabel eksogen = X1, X2, X3 terhadap variabel endogen Y₁.

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-3458080,959	1373671,26		-2,517	,029
X1	2,056	,414	,784	4,970	,000
X2	12,235	5,656	,226	2,163	,053
X3	2,815	14,873	,039	,189	,853

Sumber : Lampiran 2, Output SPSS.

Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada level of significant 0,10, diperoleh signifikan t untuk variabel PAD (X_1), sebesar 0.000, Dengan demikian variabel PAD (X_1) terbukti berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja daerah (Y_1).
2. Pada level of significant 0,10, diperoleh signifikan t untuk variabel DAU (X_2), sebesar 0.053 Dengan demikian variabel DAU (X_2) terbukti berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja daerah (Y_1).
3. Pada level of significant 0,10, diperoleh signifikan t untuk variabel DAK (X_3), sebesar 0.853 Dengan demikian variabel DAK (X_3) terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja daerah (Y_1).

Tabel 5.12 : Hasil Analisis Uji t (Uji Parsial) variabel eksogen = Y_1 terhadap variabel endogen Y_2 .

Model (Constant)	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error		
	3889738411	166787766	23.321	.000
Y1	1.135	.287	.739	.002

Sumber : Lampiran 2, Output SPSS.

Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada level of significant 0,10, diperoleh signifikan t untuk variabel belnaja daerah (Y_1), sebesar 0,002. Dengan demikian variabel belanja daerah (Y_1) terbukti berpengaruh signifikan terhadap variabel PDRB (Y_2).

Tabel 5.13: Pengaruh Langsung, Tidak Langsung dan Pengaruh total.

No	Direct Effect		Indirect Effect		Total Effect	
	Variabel	Nilai	Variabel	Nilai	Variabel	Nilai
1	X_1-Y_1	0,784 (signifikan)	$X_1-Y_1-Y_2$	$(X_1-Y_1)(Y_1-Y_2)$ (0,784)(0,739) 0.579 (signifikan)	$X_1-Y_1 + X_1-Y_1-Y_2$	1.363 (signifikan)
2	X_2-Y_1	0,226 (signifikan)	$X_2-Y_1-Y_2$	$(X_2-Y_1)(Y_1-Y_2)$ (0,226)(0,739) 0.167 (signifikan)	$X_2-Y_1 + X_2-Y_1-Y_2$	0.393 (signifikan)
3	X_3-Y_1	0,039 (tidak signifikan)	$X_3-Y_1-Y_2$	$(X_3-Y_1)(Y_1-Y_2)$ (0,039)(0,739) 0.028 (signifikan)	$X_3-Y_1 + X_3-Y_1-Y_2$	0.067 (signifikan)
4	Y_1-Y_2	0.739 (signifikan)			Y_1-Y_2	0.739 (signifikan)

Sumber: Hasil Penelitian, 2018.

5. Pengaruh Tidak Langsung dengan Menggunakan Sobel Test

a) Pengaruh tidak langsung $X_1 \rightarrow Y_2$ melalui Y_1

$$\begin{aligned}
 a &= \text{Unstandardized Coefficient } X_1 \rightarrow Y_1 &= 2,056 \\
 b &= \text{Unstandardized Coefficient } Y_1 \rightarrow Y_2 &= 1,135 \\
 Sa &= \text{Standard Error } X_1 \rightarrow Y_1 &= 0,414 \\
 Sb &= \text{Standard Error } Y_1 \rightarrow Y_2 &= 0,287
 \end{aligned}$$

Input:		Test statistic:	Std. Error:	p-value:
a	2.056	Sobel test: 3.09364068	0.75430868	0.00197717
b	1.135	Aroian test: 3.05596034	0.76360939	0.00224341
s _a	0.414	Goodman test: 3.1327501	0.74489184	0.00173177
s _b	0.287	Reset all	Calculate	

Hasil menunjukkan bahwa nilai tidak langsung adalah 3,093 ($p < 0,05$).

Hasil ini menunjukkan bahwa PAD tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB melalui Belanja Daerah.

b) Pengaruh tidak langsung $X_2 \rightarrow Y_2$ melalui Y_1

$$\begin{aligned}
 a &= \text{Unstandardized Coefficient } X_2 \rightarrow Y_1 &= & 12,235 \\
 b &= \text{Unstandardized Coefficient } Y_1 \rightarrow Y_2 &= & 1,135 \\
 S_a &= \text{Standard Error } X_2 \rightarrow Y_1 &= & 5,656 \\
 S_b &= \text{Standard Error } Y_1 \rightarrow Y_2 &= & 0,287
 \end{aligned}$$

Input:		Test statistic:	Std. Error:	p-value:
a	12.235	Sobel test: 1.89782695	7.31717135	0.05771888
b	1.135	Aroian test: 1.85278231	7.49506561	0.06391357
s _a	5.656	Goodman test: 1.94632524	7.134843	0.05161568
s _b	0.287	Reset all	Calculate	

Hasil menunjukkan bahwa nilai tidak langsung adalah 1,897 ($p > 0,05$).

Hasil ini menunjukkan bahwa DAU tidak langsung berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap PDRB melalui Belanja Daerah.

c) Pengaruh tidak langsung $X_3 \rightarrow Y_2$ melalui Y_1

$$\begin{aligned}
 a &= \text{Unstandardized Coefficient } X_3 \rightarrow Y_1 &= & 2,815 \\
 b &= \text{Unstandardized Coefficient } Y_1 \rightarrow Y_2 &= & 1,135 \\
 S_a &= \text{Standard Error } X_3 \rightarrow Y_1 &= & 14,873 \\
 S_b &= \text{Standard Error } Y_1 \rightarrow Y_2 &= & 0,287
 \end{aligned}$$

Input:		Test statistic:	Std. Error:	p-value:
a	2.815	Sobel test: 0.18905276	16.9001768	0.85005147
b	1.135	Aroian test: 0.18329655	17.43090656	0.85456534
s _a	14.873	Goodman test: 0.19538772	16.35223069	0.84508943
s _b	0.287	Reset all	Calculate	

Hasil menunjukkan bahwa nilai tidak langsung adalah 0,189 ($p > 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa DAK tidak langsung berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap PDRB melalui Belanja Daerah.

B. Pembahasan

Berdasarkan persamaan substruktur pertama dan persamaan substruktur kedua dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum memberikan pengaruh langsung terhadap belanja daerah dan PDRB serta pengaruh tidak langsung terhadap PDRB melalui belanja daerah dengan estimasi angka sebagai berikut:

1. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah

Berdasarkan hasil pengujian maka dapat diketahui pendapatan asli daerah memberikan pengaruh langsung dan positif sebesar 0.784 terhadap belanja Kota Samarinda. Pendapatan asli daerah memberikan pengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kota Samarinda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap bertambahnya pendapatan asli daerah maka akan meningkatkan belanja daerah sebesar 0.784. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan salah satu indikator yang dapat mempengaruhi peningkatan belanja daerah di Kota Samarinda.

Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah. Berdasarkan uji secara parsial untuk variabel PAD terbukti berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja daerah, sehingga hasil penelitian sejalan dengan teori tentang *tax spend hypothesis* atau pendapatan daerah (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah (Aziz et al, 2000; Doi, 1998; Von Furstenberg et al 1986). Dalam hal ini pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran.

Dalam konteks internasional, beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk melihat pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja (diantaranya adalah Cheng, 1999; Friedman, 1978; Hoover & Sheffrin, 1992). Cheng (1999) menemukan bahwa hipotesis pajak-belanja berlaku untuk kasus Pemda di beberapa negara Amerika Latin, yakni Kolombia, Republik Dominika, Honduras, dan Paraguay. Friedman (1978) menyatakan bahwa kenaikan dalam pajak akan meningkatkan belanja daerah, sehingga akhirnya akan memperbesar defisit. Menurut Hoover & Sheffrin (1992), yang secara empiris menemukan adanya perbedaan hubungan dalam dua rentang waktu yang berbeda. Mereka menemukan bahwa untuk sampel data sebelum pertengahan tahun 1960-an pajak berpengaruh terhadap belanja, sementara untuk sampel data sesudah tahun 1960-an pajak dan belanja tidak saling mempengaruhi (*causally independent*).

Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah sudah tentu Pendapatan Daerah akan meningkat dikarenakan Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Daerah yang pada akhirnya juga akan diikuti dengan peningkatan Belanja Daerah yang akan berdampak pada kemakmuran rakyat. Hasil penelitian mendukung hasil penelitian yang dilakukan Abdul Halim (2004) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi Belanja Pemerintahan Daerah, selanjutnya Kusumayoni (2004) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang diprosikan dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Novi Pratiwi (2007) juga menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dapat mempengaruhi prediksi Belanja Daerah. dan mendukung hasil penelitian Eka Saputra (2007) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Sedangkan Syukriy Abdullah (2008) menyatakan bahwa

Belanja Modal berpengaruh terhadap Belanja Pemerintah, Bantuan Pemerintah berpengaruh terhadap Belanja Modal, sementara Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

2. Pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah

Berdasarkan hasil pengujian maka dapat diketahui dana alokasi umum memberikan pengaruh langsung dan positif sebesar 0.226 terhadap belanja Kota Samarinda. Dana alokasi umum memberikan pengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kota Samarinda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap bertambahnya alokasi dana bantuan maka akan meningkatkan belanja daerah sebesar 0.226. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa alokasi dana bantuan merupakan salah satu indikator yang dapat mempengaruhi peningkatan belanja daerah di Kota Samarinda.

Pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah. Berdasarkan uji secara parsial variabel DAU terbukti berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja daerah. Hasil penelitian sesuai dengan teori yang ada. Secara teoritis, respon tersebut akan mempunyai efek distributif dan alokatif yang tidak berbeda dengan sumber pendanaan lain, misalnya pendapatan pajak daerah (Bradford & Oates, 1971). Namun, dalam studi empiris hal tersebut tidak selalu terjadi.

Stimulus terhadap pengeluaran daerah yang ditimbulkan oleh transfer atau *grants* tersebut sering lebih besar dibandingkan dengan stimulus dari pendapatan (pajak) daerah sendiri (*flypaper effect*). Holzt-eakin et al (1985) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari Pempus dengan belanja Pemerintah daerah.

Studi Legrenzi & Milas (2001), menggunakan sampel *municipalities* di Italia, menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan Pemda dalam jangka pendek disesuaikan (*adjusted*) dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang *non-linier* dan *asymmetric*.

Gamkhar & Oates (1996) menganalisa respon Pemda terhadap perubahan jumlah transfer dari pemerintah federal di Amerika Serikat untuk tahun 1953-1991. Mereka menyatakan bahwa pengurangan jumlah transfer (*cuts in federal grants*) menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah. Studi Holzt-Eakin et al (1994) menganalisis model

maximizing under uncertainty of intertemporal utility function dengan menggunakan data runtun waktu selama tahun 1934-1991 untuk mengetahui seberapa jauh pengeluaran daerah dapat dirasionalkan melalui suatu model, dimana keputusan-keputusan didasarkan pada ketersediaan sumberdaya secara permanen, bukan ketersediaan yang sifatnya temporer. Mereka menemukan bahwa semua *current spending* ditentukan oleh *current resources*. Studi Holzt-Eakin et al (1985) menemukan bahwa *grants* tahun lalu dapat memprediksi belanja tahun ini, namun sebaliknya, belanja tahun lalu tidak dapat memprediksi pendapatan tahun berjalan.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat. DAU bisa disebut dengan bantuan transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan yang diprioritaskan untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai, untuk membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan serta untuk pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan publik, baik pelayanan dasar maupun pelayanan umum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga DAU menjadi sumber pendanaan yang penting bagi pemerintah daerah untuk mencukupi kebutuhan belanja. Penelitian yang dilakukan oleh (Masdjojo dan Sukartono 2009; Apriliawati, 2016; Aqnisa, 2016; Ikasari, 2015) yang menyatakan bahwa peningkatan DAU diikuti dengan peningkatan yang lebih besar pada Belanja Daerah.

3. Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil pengujian maka dapat diketahui dana alokasi khusus memberikan pengaruh langsung dan positif sebesar 0.039 terhadap belanja Kota Samarinda. Dana alokasi khusus memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap belanja daerah di Kota Samarinda.

DAK merupakan sumber pendapatan yang dialokasikan dari APBN kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus lain dari alokasi umum, misalnya pembangunan jalan di kawasan terpencil, sarana-prasarana untuk daerah. Semakin banyak DAK yang diterima, berarti daerah tersebut masih tergantung terhadap pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa DAK mempunyai pengaruh terhadap Belanja Daerah.

Pada hakikatnya DAK adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus sebagai urusan daerah dan sesuai prioritas nasional. Menurut UU No. 33 tahun 2004, yang dimaksud kebutuhan khusus adalah kebutuhan

yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional (Yuwono 2008:51). Belanja Daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang dapat mengakibatkan berkurangnya nilai ekuitas dana sebagai kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran serta tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

daerah (Yuwono 2008:96). Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Riset Muis (2012) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta juga berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan

tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Hermawan, 2016). Menurut Kuncoro (2011:343) salah satu persyaratan untuk menerima DAK adalah daerah perlu membuktikan bahwa daerah kurang mampu membiayai seluruh pengeluaran usulan kebutuhan tersebut dari PAD, bagi hasil pajak dan sumber daya alam, DAU, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Artinya, DAK sebagai salah satu komponen pendapatan daerah juga diperlukan daerah untuk mencukupi kebutuhan pengeluaran belanja, namun untuk kebutuhan yang bersifat lebih spesifik. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Masdjojo dan Sukartono, 2009) yang menyimpulkan DAK berpengaruh positif terhadap belanja daerah namun tidak signifikan. Ketika terjadi peningkatan DAK, maka belanja daerah juga meningkat namun tidak signifikan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Muliana, 2009; Aqnisa, 2016) yang menyimpulkan bahwa DAK berpengaruh negatif terhadap belanja daerah.

4. Pengaruh belanja daerah terhadap produk domestik regional bruto

Berdasarkan hasil pengujian maka dapat diketahui belanja daerah memberikan pengaruh langsung dan positif sebesar 0.739 terhadap PDRB Kota Samarinda. Belanja daerah memberikan pengaruh signifikan terhadap PDRB di Kota Samarinda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap bertambahnya belanja daerah maka akan meningkatkan jumlah PDRB sebesar 0.739. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa belanja daerah merupakan salah satu indikator yang dapat mempengaruhi PDRB di Kota Samarinda.

Pengaruh belanja daerah terhadap PDRB. Berdasarkan uji secara parsial variabel belanja daerah terbukti berpengaruh signifikan terhadap variabel PDRB. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iskana (2009).

Iskana (2009) meneliti tentang Pengaruh Belanja dan Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan Dan Pengangguran pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan Belanja Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran.

Pendapatan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran. Untuk Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran.

Indonesia telah melakukan kebijakan mengatasi permasalahan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah, akan tetapi fenomena yang terjadi justru menunjukkan bahwa jumlah masyarakat miskin tidak berkurang. Ini membuktikan bahwa hasil pembangunan yang dilakukan selama ini belum memberikan kemakmuran yang merata sehingga terjadi kesenjangan pendapatan. Jika setiap daerah mampu mengoptimalkan

berbagai potensi di sektor masing-masing, maka dengan sendirinya peningkatan terhadap PAD akan lebih tinggi. Dengan begitu daerah tersebut akan meminimalkan tingkat pengangguran di daerahnya dan mengurangi jumlah kemiskinan yang ada di daerah.

5. Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap produk domestik regional bruto melalui belanja daerah

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah memberikan pengaruh positif secara tidak langsung terhadap PDRB melalui belanja daerah sebesar 0.579 ($X_1 \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_2$). Dana alokasi umum memberikan pengaruh positif secara tidak langsung terhadap PDRB melalui belanja daerah sebesar 0.167 ($X_2 \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_2$). Dana alokasi khusus memberikan pengaruh positif secara tidak langsung terhadap PDRB melalui belanja daerah sebesar 0.028 ($X_3 \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_2$).

Peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi (Saragih, 2003:33). Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Pemerintah daerah di dalam membiayai belanja daerahnya, selain dengan menggunakan transfer dari pemerintah pusat, mereka juga menggunakan sumber dananya sendiri yaitu PAD. Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki pendapatan perkapita yang lebih baik (Harianto dan Adi, 2007). Apabila suatu daerah PAD-nya meningkat maka dana yang dimiliki pemerintah akan meningkat pula. Peningkatan ini akan menguntungkan pemerintah, karena dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sehingga pertumbuhan ekonomi daerah tersebut meningkat pula.

Basis utama perhitungan DAU adalah kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) atau perbedaan antara kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal di masing-masing daerah. Penelitian yang dilakukan Adi Priyo (2006) membuktikan bahwa PDRB suatu daerah memberikan dampak yang positif terhadap DAU. Hal ini membuktikan bahwa transfer pemerintah dalam bentuk DAU memiliki peran yang penting di dalam perekonomian suatu daerah.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 pengalokasian DAU ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Apabila suatu daerah memiliki potensi fiskal dan PDRB yang besar tetapi kebutuhan fiskal kecil maka akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya, untuk daerah yang potensi fiskalnya kecil dan PDRB yang kecil sedangkan kebutuhan fiskalnya besar maka akan memperoleh alokasi DAU yang relatif besar.

PDRB diindikasikan dipengaruhi oleh: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Dana Alokasi Umum (DAU), (3) Dana Alokasi Khusus (DAK) dan (4) Dana Otonomi Khusus (DOK). Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, yaitu untuk membiayai investasi dan infrastruktur yang dalam jangka panjang akan meningkatkan PDRB suatu daerah, hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan

oleh Friska Sihite (2012), bahwa DAK berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, penelitian dilakukan di Provinsi Sumatera Utara. Bergulirnya Otonomi Daerah yang dimulai dengan lahirnya UU Nomor 22 tahun 2009, membawa konsekuensi, salah satunya adalah dari segi aspek kinerja keuangan yang dituntut lebih akuntabel dan transparan. Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi terletak pada kesiapan dan kemampuan daerah untuk menerima beban dan tanggung jawab yang dimilikinya dalam mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri. Artinya, pemerintah daerah harus mampu meningkatkan PAD nya melalui berbagai potensi yang dimiliki. Dengan kata lain, PAD pemerintah daerah yang masih rendah dan selama daerah masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pusat, maka selain akan meningkatkan beban anggaran pemerintah pusat, otonomi yang diharapkan dapat menciptakan kemandirian tersebut akan sulit untuk dilaksanakan.

Anis Setyawati (2007), bahwa DAK berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2001 – 2005, sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Friska Sihite (2012), DAK berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang dilakukan pada Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 – 2007. berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulfi Maryati (2010), bahwa DAK berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat Tahun 2004 – 2006

Hasil pembangunan yang dilakukan selama ini belum memberikan kemakmuran yang merata sehingga terjadi kesenjangan belanja daerah yang dilakukan pemerintah belum memberikan dampak pada optimalisasi produk domestik regional bruto di Kota Samarinda. Jika setiap daerah mampu mengoptimalkan berbagai potensi di sektor masing-masing, maka dengan sendirinya peningkatan terhadap perkembangan produk domestik regional bruto akan lebih tinggi.

Upaya peningkatan pendapatan asli daerah, distribusi dana alokasi umum yang tepat sasaran dan penambahan jumlah penduduk dalam rangka peningkatan PDRB di Kota Samarinda tidak dapat direalisasi secara optimal apabila melalui belanja daerah. Hal ini dikarenakan belanja daerah merupakan kegiatan menggunakan pendapatan daerah yang bertujuan untuk pencapaian kemakmuran masyarakatnya akan tetapi tujuan tersebut tidak akan tercapai apabila daerah belum mampu melaksanakan fungsi efisiensi, optimalisasi dan pengawasan yang menyeluruh terhadap sistem perolehan pendapatan maupun pengeluaran, sehingga anggaran yang diperoleh melalui pendapatan daerah akan dibelanjakan untuk program yang sebenarnya masih belum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Samarinda.

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Kota Samarinda, hal ini mempunyai arti bahwa setiap peningkatan pendapatan asli daerah akan menyebabkan peningkatan belanja daerah di Kota Samarinda.
2. Dana alokasi umum berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Kota Samarinda, hal ini mempunyai arti bahwa setiap peningkatan dana alokasi umum akan menyebabkan peningkatan belanja daerah di Kota Samarinda.
3. Dana alokasi khusus berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah di Kota Samarinda, hal ini mempunyai arti bahwa setiap peningkatan dana alokasi umum akan menyebabkan peningkatan belanja daerah di Kota Samarinda.
4. Belanja daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto di Kota Samarinda, hal ini mempunyai arti bahwa setiap peningkatan belanja daerah akan menyebabkan penurunan PDRB di Kota Samarinda.
5. Pendapatan asli daerah berpengaruh secara tidak langsung positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto melalui belanja daerah di Kota Samarinda, hal ini mempunyai arti bahwa setiap peningkatan pendapatan asli daerah akan meningkatkan PDRB dengan belanja daerah sebagai variabel mediasi.
6. Dana alokasi umum berpengaruh secara tidak langsung positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto melalui belanja daerah di Kota Samarinda, hal ini mempunyai arti bahwa setiap peningkatan dana alokasi umum akan meningkatkan PDRB dengan belanja daerah sebagai variabel mediasi.
7. Dana alokasi khusus berpengaruh secara tidak langsung positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto melalui belanja daerah di Kota Samarinda, hal ini mempunyai arti bahwa setiap peningkatan dana alokasi khusus akan meningkatkan PDRB dengan belanja daerah sebagai variabel mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akdon & Riduwan. 2009. *Rumus dan Data dalam Analisis Statistika*. Alfabeta. Bandung.
- Bati. 2009. *Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten dan Kota di Sumatra utara)*
- Guritno, Mangkoesoebroto, 2004, *Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta.
- Harinaldi, 2005, *Prinsip-Prinsip Statistik Untuk Teknik dan Sains*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Insukindro, 2004, *Penerimaan Pajak*, Djambatan, Bandung.
- Jhingan, M. L. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. D. Guritno [penerjemah]. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lipsey, Richard G., dan Steiner, Peter O, 2001. *Economics*. Edisi Keenam, New York, Harper International Edition.
- Mankiw, N. G. 2006. *Teori Makro Ekonomi Edisi Keenam*. Imam Nurmawan [penerjemah]. Erlangga, Jakarta.
- Mudrajat kuncoro, 2006. *Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: STIM YKPN d/h Hamp YKPN.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Nasucha, Chaizi, 2007, *Peranan Informasi Pertanahan Dalam Pengelolaan PBB, Jurnal Survei dan Properti* Vol. 009.
- Rahardja, Prathama dan Manurung, Mandala, 2008. *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*. Edisi Keempat, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rahardjo Adisasmito, *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005)
- Rohmawati, Dewi Sintani. 2011. *Analisis Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Belanja Daerah di Kabupaten Sumenep*. Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan NASIONAL “Veteran” Jawa Timur.
- Saragih, J. P. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Setiyawati, Anis. 2007. *Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran: dengan Pendekatan Analisis Jalur*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Desember 2007, Vol. 4, No. 2, Hal. 211-228.
- Situngkir, Anggiat. 2009. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal, Alokasi khusus pada Pemkab Sumatra Utara*, ([http: www.google.com](http://www.google.com), diakses 20 september 2010)
- Sugiyono. 2008. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sunyoto, Danang. 2010. *Uji Khi Kuadrat & Regresi untuk Penelitian*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Tarigan, Robinson. 2006. *Ekonomi Regional teori dan aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro, M. P dan Smith, S. C. 2006. *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan*. Haris Munandar [penerjemah]. Erlangga, Jakarta.
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga,